

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR

2021

PERBUP NO. 55 BD. 2021. NO. 55 LL. KAB. PEMALANG : 22 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menjadikan prioritas utama terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya dilaksanakan melalui penerapan standar pelayanan minimal dan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam menyusun mekanisme dan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal diperlukan suatu pengaturan yang baku.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permendik No. 32 Tahun 2018; PermenPU PR No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam menerapkan SPM pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur koordinasi penerapan SPM dalam hal Pelaksanaan Penerapan SPM, Pembentukan Kelembagaan non struktural, Pembinaan dan Pengawasan dan Pembiayaan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Desember 2021
 - Terdiri dari 26 Pasal
 - Lampiran 7 halaman